

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM IBN KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN SISDIKNAS

Muhammad Kosim

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol

Email: muhkosimpadang@yahoo.com

Abstrak: Ibn Khaldun merupakan intelektual muslim yang memiliki multikeilmuan dan keahlian. Ia dikenal sebagai sejarawan, sosiolog, politisi, bahkan filosof. Namun dalam karya monumentalnya, Muqaddimah, Ibn Khaldun juga memiliki pemikiran bernas tentang pendidikan yang ia tulis hampir memenuhi sepertiga dari isi Muqaddimah tersebut. Karena itu ia patut disebut sebagai tokoh pendidikan Islam. Karena Ibn Khaldun adalah intelektual muslim yang tak diragukan keilmuannya tentang studi Islam, maka menarik untuk mengkaji pandangannya tentang Pendidikan yang dalam banyak hal tentu dipengaruhi oleh pemahamannya tentang ajaran Islam di samping problematika dan realita umat di masanya. Pemikiran pendidikannya yang religius, kritis dan humanis itu bisa menjadi referensi pengembangan pendidikan Islam, khususnya dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, terutama di era kekinian dimana pengembangan ilmu pengetahuan lebih cenderung berorientasi pada konsep Barat (barat centris), termasuk bidang pendidikan.

Kata Kunci: Ibn Khaldun, Pendidikan Islam.

Abstract: *Ibn Khaldun is a Muslim intellectual who has multiculturalism and expertise. He is known as a historian, a sociologist, a politician, even a philosopher. But in his monumental work, Muqaddimah, Ibn Khaldun also has a pithy thought about the education he wrote almost fulfilling a third of the contents of the Muqaddimah. Therefore he should be called as a leader of Islamic education. Since Ibn Khaldun is a Muslim intellectual who is undoubtedly a scholar of Islamic studies, it is interesting to examine his views on Education which in many ways was influenced by his understanding of Islamic teachings in addition to the problems and realities of the people of his time. His religious, critical and humanist educational thinking can be a reference for the development of Islamic education, especially in the National Education System in Indonesia, especially in the contemporary era where the development of science tends to be oriented towards western (west centric) concepts, including education*

Keywords: *Ibn Khaldun, Islam Education.*

Pendahuluan

Dewasa ini, dunia Barat mendapat pengakuan dan banyak pihak sebagai bangsa yang lebih maju dan lebih berperadaban. Kemajuan tersebut tidak terlepas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Barat dianggap lebih mampu menyajikan berbagai temuan baru secara dinamis dan varian, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap sains dan teknologi modern. Oleh

karenanya, berbagai belahan dunia merasa tertarik terhadap Barat dan berkiblat kepadanya dalam segala hal, terutama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Islam memang tidak melarang umatnya untuk belajar dari kalangan non-Muslim. Akan tetapi, sistem pendidikan Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah yang diyakini mutlak kebenarannya membutuhkan pemikiran dan interpretasi dari para tokoh intelektual Islam itu sendiri. Untuk itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemikiran para tokoh Islam, terutama yang berpengaruh di zamannya, lalu menganalisis di antara pemikirannya yang relevan untuk dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan Islam dewasa ini, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu dari pemikir pendidikan Islam yang layak mendapat tempat untuk dikaji dan dikembangkan adalah pemikiran Abdurrahman Ibn Khaldun, atau lebih dikenal dengan Ibn Khaldun.

Ibn Khaldun merupakan tokoh intelektual muslim yang berpengaruh di awal abad XV (1332-1406 M). Meskipun ketokohnya lebih sering dikenal sebagai seorang sosiolog, filosof dan sejarawan, akan tetapi dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, ia banyak menulis tentang pendidikan. Bahkan hampir sepertiga dari karya tersebut berbicara tentang pendidikan, termasuk. Secara umum, terdapat enam pembahasan yang terkandung dalam kitab ini, yaitu: *pertama*, tentang kehidupan manusia menurut jumlah, dan jenis-jenis serta penyebarannya di bumi; *kedua*, tentang kehidupan orang Badawi dan kabilah-kabilahnya serta bangsa-bangsa primitif; *ketiga*, tentang negara dan kerajaan serta tingkat-tingkat kekuasaannya; *keempat*, tentang kehidupan peradaban, kota-kota dan tempat tinggal; *kelima*, tentang pekerjaan, penghidupan, dan karya hasil usaha; dan *keenam*, tentang ilmu pengetahuan dan cara-cara memperolehnya. Bab yang khusus membahas tentang pendidikan adalah bab terakhir, akan tetapi secara kuantitas bab ini hampir sepertiga dari keseluruhan isi kitab *Muqaddimah*.

Hal yang lebih menarik lagi dilakukannya kajian ini adalah kitab *Muqaddimah* yang ia susun juga berdasarkan hasil pengamatan empiris yang ia lakukan di lingkungannya serta pengamatan sejarah yang ia kuasai, membuat pemikirannya masih banyak yang relevan untuk diteliti dan diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Kerena itu menarik diperbincangkan apakah Ibn Khaldun memang patut sebagai tokoh pendidikan Islam? Jika ia, masih relevankah pemikirannya dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia? Tulisan ini akan berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sekilas tentang Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Khalid bin Utsman. Nama aslinya adalah Abdurrahman, sementara nama keluarganya Abu Zaid dan gelarnya Waliuddin. Ia lebih dikenal dengan nama Ibn Khaldun (Ali Abdul Wahid Wafi', 2004: 25). Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Ia berasal dari keluarga yang terkemuka di mana garis keturunan dari pihak ayahnya—kecuali ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan—merupakan ahli dalam bidang politik (Samsul Nizar, 2004: 29). Oleh karena itu, guru pertama Ibn Khaldun adalah ayahnya sendiri.

Ketika sudah mencapai usia untuk belajar, ia melanjutkan pelajarannya dan berguru kepada sejumlah ahli. Di antara sekian banyak gurunya, ada dua guru yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang keilmuan yang digelutinya, baik dari segi hukum, bahasa, dan hikmah, yaitu: Abu Muhaimin ibn Abdul Muhaimin al-Hadhramy (imam para ahli hadis dan nahwu di Moroko) dan Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abily. Ia mulai menghafal al-Qur'an dan tajwidnya sesuai dengan metode yang berlaku di sebagian besar negara-negara Islam. Masjid pada masa-masa itu adalah sentral pendidikan. Ibn Khaldun pun menuntut ilmu di Masjid yang hingga kini masjid itu masih dikenal masyarakat Tunis, yaitu Masjid Qubah. Ia juga memperdalam *Qira'at Sab'ah* dan *Qira'at Ya'qub*, dasar-dasar ilmu bahasa Arab, kesusastraan dan gramatika, lalu mendalami ilmu usul fiqh dan fiqh dari mazhab Maliki, kemudian ilmu tafsir dan hadis serta mendalami filsafat dan logika/mantiq (Ali Abdul Wahid Wafi', 2004: 37-39). Ia pun memperoleh ilmu kalam dari mazhab al-Asy'ariyah (Ali al-Jumbulati, 1994: 180).

Musibah wabah penyakit *tha'un* pada tahun 749 H yang mengakibatkan kematian kedua orang tuanya telah memaksa Ibn Khaldun untuk bekerja dengan memilih terjun ke bidang politik dan pemerintahan, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Selama karirnya, ia pernah memegang sejumlah jabatan di beberapa masa pemerintahan dan tempat yang berbeda, di antaranya: *Kitābah al-'Allamah* (akhir 751 H) di Tunis, Anggota dewan bidang ilmu pengetahuan dan salah seorang sekretaris Sultan (755-758) di Fez, *Katib*/sekretaris (760), Diplomat/duta negara (765) di Granada, *Hijābah* (semacam perdana menteri) di Bijayah.

Karyanya yang paling terkenal adalah *Kitāb al-'Ibar wa Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Ayyām al-Arb wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Āsharahum min Dzawī al-Sulthān al-Akbar* (kitab contoh-contoh dan rekaman tentang asal usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persi, Barbar dan orang-orang yang sezaman dan mereka yang memiliki

kekuasaan besar), atau sering disingkat dengan sebutan kitab *al-'Ibar* saja. Kitab *al-'Ibar* ini ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang selama empat tahun, yaitu akhir 776 H (1374 M) dan selesai akhir 780 H (1378 M), terdiri atas tujuh jilid di mana jilid pertamanya dikenal dengan kitab *Muqaddimah* yang berisikan pembahasan tentang gejala-gejala sosial yang diselesaikan selama lima bulan. Sedangkan enam jilid lainnya berisi tentang sejarah dan alam semesta. Namun di kemudian hari, kitab *Muqaddimah* ini menjadi kitab yang lebih dikenal dan menjadi objek penelitian oleh para ilmuwan pada masa-masa sesudahnya.

Ibn Khaldun juga memiliki karya berupa auto-biografi yang berjudul "*al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*". Kitab ini awalnya merupakan bagian akhir dari tujuh jilid kitab *al-'Ibar*, tetapi kemudian dipisahkan menjadi kitab tersendiri dan dirampungkan oleh Ibn Khaldun sendiri pada tahun 797 H (1395 M). Karena luas dan mendalamnya kitab ini, Ali Abdul Wahid Wafi' (2004: 292-293) menyebutnya sebagai "peneliti pertama yang menuliskan auto-biografi secara luas dan terperinci".

Hal yang menarik dari sisi kehidupan Ibn Khaldun adalah ia dikenal memiliki banyak keahlian. Wafi' mencatat jasa-jasa dan keahlian Ibn Khaldun meliputi: Pembina yang pertama dan ilmu *'Umran Basyari* (Sosiologi), Imam dan pembaharu ilmu Sejarah, Imam dan mujadid dalam ilmu Oto-Biografi, Imam dan pembaharu di bidang Sastra dan Karang-mengarang, Ahli Ilmu Hadis, Ahli Ilmu Fiqih Imam Malik, 'Alim dan menguasai ilmu-ilmu yang beraneka ragam, Imam dan pembaharu di bidang pendidikan, pelajaran dan ilmu jiwa, Administrator dan organisator, serta Negarawan dan politikus besar.

Pada 25 Muharram 786 H, ia ditunjuk oleh raja, *al-Dzariq al-Barquq*, untuk menjadi dosen dalam fiqh Maliki di Madrasah al-Qamhiah Mesir. Bahkan Sultan juga pernah mengangkatnya sebagai ustadz (guru besar) dalam mata kuliah Fiqh Maliki di Madrasah *adz-Dzahiriah al-Barquqiah*. Madrasah tersebut dijadikan sebagai Madrasah Aliyah (sekolah tinggi) dan sangat terkenal di masa itu (Ali Abdul Wahid Wafi', 2004: 60-61). Jika diringkas jabatan yang ia pegang secara berturut-turut sesuai dengan pemerintahan tempatnya bertugas, Muhammad Kosim (2012: 22-23) meringkasnya sebagai berikut:

No	Jabatan	Masa Pemerintahan	Tempat
1	<i>Kitābah al-'Allamah</i>	Perdana Menteri Ibn Tafrakin (akhir 751 H), Sultan Fadl	Tunis, Maroko bagian bawah
2	Anggota dewan bidang ilmu	Abu Anan (755 - 758)	Fez, Maroko bagian Atas

No	Jabatan	Masa Pemerintahan	Tempat
	pengetahuan dan salah seorang sekretaris Sultan	Hasan bin Umar (760 H)	Sda
3	<i>Katib</i> (sekretaris)	Sultan Mansur bin Sulaiman (760)	Sda
4	<i>Kātib</i> dan perencana <i>Khittah al-Mazhālim</i>	Abu Salim bin Abu Hasan	Sda
		Menteri Umar bin Abdullah	Sda
5	Diplomat/duta negara	Sultan Muhammad bin bin Yusuf Ismail bin Ahmar an-Nashri (raja ketiga dinasti Ahmar) (765 H)	Granada, Andalusia
6	<i>Hijābah</i> (semacam perdana menteri)	Abu Abdillah Hafsy (766 - 767 H)	Bijayah, Maroko bawah
		Abu Abbas	Sda

Agaknya pengalaman inilah yang mempengaruhi kitab Muqaddimah nya sehingga bernilai tinggi, tidak saja didasari oleh pemikirannya yang jenius, tetapi berangkat dari pengalaman yang ia lalui.

Pada tanggal 26 Ramadhan 808 (16 Maret 1406), Ibn Khaldun meninggal dunia secara mendadak dalam usia 76 tahun dan ketika itu ia masih menjabat sebagai hakim. Ia dimakamkan di pekuburan yang berada di *Kharij babu nasr* yang berada dalam daerah Ridaniah, yang sekarang disebut dengan Abbasiyah (Ali Abdul Wahid Wafi', 2004: 77). Pekuburan ini hanya dikhususkan bagi para sufi, sebagaimana Ibn Khaldun termasuk anggota dewan sufi, karenanya ia berhak atas tempat tersebut.

Pokok-pokok Pikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun

Dari kitab Muqaddimah, ada beberapa rumusan pemikiran Ibn Khaldun terkait dengan pendidikan Islam, sebagai berikut.

1. Hakikat Manusia

Dalam kajian filsafat pendidikan, manusia merupakan kajian ontology yang mesti jelas sehingga konsep pendidikan yang akan ditawarkan dan dikembangkan akan jelas pula sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Ibn Khaldun, dalam kitab *Muqaddimah-*

nya juga membicarakan tentang manusia. Adapun hakekat manusia tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Manusia sebagai Makhluk Berpikir

Ibn Khaldun mengemukakan ada tiga tingkatan berjenjang yang distingtif dalam proses berpikir, yaitu: *Al-'aql al-tamyizi* (akal pemilah), *Al-'aql al-tajribi* (akal eksperimental), dan *Al-'aql al-nadhari* (akal kritis/spekulatif). Dalam pandangan Ibn Khaldun fungsi puncak akal adalah penggambaran (konseptualisasi) realitas secara objektif, detail dan mendalam dengan rangkaian kausalitas di dalamnya. Dengan fungsi tersebut, akal mampu mencapai perkembangan sempurna dan tercerahkan (M. Jawwad Ridla, 2002: 178).

Meskipun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun memuji kedudukan manusia karena akalnya, tetapi akal memiliki garis batas yang jelas. Akal hanya berperan dalam hal-hal yang bersifat empiris-eksperimental. Sementara dalam memahami teologis, eskatologis, esensi kenabiah dan hal-hal yang bersifat metafisis lainnya, tidaklah mutlak diketahui oleh akal. Jika akal digunakan untuk 'menimbang' persoalan metafisis tersebut, Ibn Khaldun (2000, 593) menganalogikan dengan "timbangan emas menimbang gunung". Bukan berarti timbangannya tidak berguna, tetapi timbangan tersebut hendaknya digunakan secara proporsional. Demikian pula akal, kedudukannya sangat istimewa dan menentukan kemuliaan manusia itu sendiri, tetapi peran akal juga hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional.

Meskipun akal memiliki batasan, yang jelasnya ia tetap berfungsi sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manusia mesti menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu sehingga ia mencapai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Jika tidak, maka kemanusiaanya bisa sama dengan binatang. Sebab, bagi Ibn Khaldun, sebelum manusia itu memiliki *al-'aql tamyiz*, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan, dan secara umum dia dianggap sama dengan "binatang". Pemahaman ini berangkat dari adanya kesamaan antara binatang dengan manusia dalam hal proses penciptaan secara jasmaniah yang dimulai dari sperma, segumpal darah, sekerat daging, dan seterusnya. Hanya saja, manusia dianugerahkan Allah berupa cerapan inderawi dan penalaran yang disebut dengan akal pikiran (Muhammad Kosim, 2012: 47).

b. Dimensi Kepribadian Manusia

Pemikiran Ibn Khaldun tentang kepribadian manusia, bisa dikelompokkan menjadi tiga dimensi, yaitu: *Pertama*, aspek jasad. Dimensi jasad dibekali dengan beberapa alat indera, seperti mata, telinga, tangan, kaki, hidung, telinga, otak dan lain

sebagainya. Dalam hal ini manusia berserikat dengan binatang karena sama-sama memiliki jasad. Bahkan dalam keadaan tertentu, binatang “lebih tinggi” kedudukannya dalam persoalan jasad, seperti kekuatan yang ada pada binatang buas tentu lebih tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan kekuatan fisik—sebagai dimensi jasad—yang dimiliki manusia (Ibn Khaldun, 2000: 72).

Kedua, aspek al-nafs. Menurutnya (2000, 145), jiwa yang pada dasarnya fitrah (suci), siap menerima kebajikan atau kejahatan yang datang dan melekat padanya. Namun karena adanya dua sifat tersebut, maka salah satu dari keduanya yang pertama kali masuk dan terbiasa akan mempengaruhi kepribadiannya. Apabila kebiasaan berbuat kebajikan masuk pertama kali ke dalam jiwa orang baik, dan jiwanya terbiasa dengan kebajikan, maka orang tersebut akan menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan sukar menemukan jalan ke sana. Demikian pula sebaliknya. Jika saja manusia itu mampu mendidik jiwanya dengan kebajikan, niscaya ia beruntung. Sebaliknya, jika ia melalaikan jiwanya dengan mengotorinya, niscaya akan merugi dan menyesali perbuatannya.

Ketiga, aspek al-ruh. Alam ruh adalah alam yang tertinggi dari alam yang lainnya, sehingga dimensi ruh dalam diri manusia pun sangat menentukan kualitas kepribadiannya. Untuk itu, Ibn Khaldun (2000: 531) menyatakan bahwa pada waktu tertentu jiwa manusia harus memiliki persiapan untuk lepas dari kemanusiaan ke Malaikat agar benar-benar menjadi sebagian dari Malaikat. Inilah yang terjadi pada nabi-nabi sehingga mereka memperoleh wahyu melalui perantaraan Malaikat. Dari pemahaman seperti ini, manusia biasanya--tentunya bukan nabi—sewaktu-waktu juga perlu “melepaskan” jiwanya dari kehendak jasmaniah yang cenderung bersifat materialistis menuju alam Malaikat yang bersifat spiritual. “Melepas” di sini bukan berarti mengabaikan kebutuhan atau hak jasmani, tetapi tidak mengalami ketergantungan dengan tuntutan jasmani tersebut.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hakekat ruh adalah baik, tidak seperti jiwa (*al-nafs*) yang mengandung sifat kejahatan. Kemudian ruh berpusat pada *qalbu*. Meskipun demikian, antara ruh, jiwa dan jasad merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam kepribadian manusia.

c. Manusia sebagai Khalifah Allah fi al-Ardh, makhluk individu dan sosial

Konsep *khalifah Allah fi al-ardh* yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan akal pikiran manusia dalam mengenal dan mengelola benda-benda/substansi-substansi materi yang ada di muka bumi ini. Dalam hal ini, manusia mesti menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Ibn Khaldun

(2000: 526) mengutip pendapat para filosof—di sini Ibn Khaldun tidak menyebutkan nama-nama filosof tersebut—“manusia adalah makhluk sosial” (*al-insanu madaniyyun bit thab’i*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan dorongan utama untuk bermasyarakat tersebut adalah karena manusia mempunyai akal. Kemudian karena akal, manusia berbeda dengan binatang. Dengan akal dan fikiran mendorong manusia untuk bekerja sama sesama manusia. Dengan kerja sama itu pula ia dapat memenuhi kehendak dan iradat Allah untuk memelihara jenis manusia dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi (lihat Hakimul Ikhwan Affandi, 2004: 66).

2. Tujuan Pendidikan Islam

Ibn Khaldun memang tidak menulis tujuan pendidikan Islam secara eksplisit. Namun setelah memahami karya Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, Muhammad Kosim (2012: 63) merumuskan tujuan pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun pada tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dari segi struktur kepribadiannya, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani (*akal, nafs, dan ruh*) secara optimal sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna.
- b. Dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban maju.
- c. Dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu mengemban amanah sebagai khalifah *fi al-ardhi* dalam memelihara jagad raya ini.

Dari tiga sudut pandang tersebut, dapat dilihat bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tujuan pendidikan Islam, terutama pada prinsip keseimbangan dan menyeluruh/universal (Omar M. Al-Toumy al-Syaibany, 1979: 337). Pendidikan yang berperan mendidik manusia yang sesungguhnya mesti mengembangkan berbagai potensi yang ada secara seimbang atau proporsional. Dengan paradigma seperti itu, maka diharapkan pendidikan tidak bersifat parsial melainkan secara holistik, menyentuh seluruh aspek kepribadian manusia sehingga ia mampu melakukan hubungan baik kepada sesamanya sebagai

mahluk sosial serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi.

3. Kurikulum dan Hakikat Ilmu

Salah satu inti dari kurikulum adalah adanya materi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Ibn Khaldun (2000, 650-651) membagi ilmu menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. *Al-Ulum al-Naqliyyah (pengetahuan-pengetahuan penukilan)*; Ilmu-ilmu yang ada pada kelompok ini, menurut Ibn Khaldun adalah ilmu-ilmu tradisional, konvensional (*al-‘ulum an-naqliyyah al-wadh’iyyah*) yang semuanya bersandar kepada informasi berdasarkan otoritas syariah yang diberikan. Misalnya, Ilmu-ilmu tafsir Qur’an dan qiraat Qur’an, Ilmu-ilmu hadis, Ilmu-ilmu fiqh dan cabang-cabangnya, hukum-hukum waris Fiqh, Ilmu Faraidh, Ilmu ushul fiqh dan cabang-cabangnya, dialektika dan soal-soal yang kontroversial, Ilmu Kalam, Ilmu Tasawuf, dan mu ta’bir mimpi.
- b. *Al-Ulum al-Aqliyyah (pengetahuan-pengetahuan rasional)*; Kelompok ilmu yang kedua ini juga disebut dengan *ulum al-fasafah wa al-hikmah* atau ilmu-ilmu filsafat dan hikmah. Secara garis besar, ilmu-ilmu aqliyah ini dikelompokkan lagi oleh Ibn Khaldun ke dalam 4 macam, yaitu: Ilmu logika (*manthiq*), Ilmu alam, atau disebut juga “fisika”, Ilmu “metafisika”, dan Ilmu matematika (*Geometri, Aritmetika, Musik, Astronomi*).
- c. *Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Bahasa Arab (ilmu alat)*; Bagi Ibn Khaldun, sendi bahasa Arab itu ada empat, yaitu: Ilmu Nahwu, Ilmu Leksikografi, Ilmu Bayan, dan Ilmu Sastra (*Adab*).

Selain dari klasifikasi di atas, Ibn Khaldun (2000: 757) juga mengklasifikasikan ilmu berdasarkan kepentingannya untuk pelajar, yaitu:

- 1) Ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faedahnya yang sebenarnya dari ilmu itu sendiri, seperti ilmu-ilmu *syar’iyyah* (tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam), ilmu-ilmu alam (*thabi’iyyat*) dan sebagian dari filsafat yang berhubungan dengan ketuhanan, metafisika (*ilahiyat*).
- 2) Ilmu-ilmu yang merupakan alat untuk mempelajari golongan ilmu pengetahuan jenis pertama di atas. Jenis kedua ini termasuk ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama, serta ilmu logika yang membantu untuk mempelajari filsafat. Kadang-kadang ilmu logika juga dipergunakan oleh para sarjana yang datang kemudian untuk mempelajari ilmu kalam dan ushul fiqh.

Selanjutnya, Ibn Khaldun (2000: 754) juga memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan anugerah dari Allah SWT. Meskipun ia mengklasifikasikan jenis ilmu kepada dua kelompok, naqliyah dan aqliyah, tetapi pada hakekatnya semua berasal dari Allah. Ilmu naqliyah yang bersumber dari al-Qur'an jelas merupakan *kalam* Allah. Sementara kelompok ilmu aqliyah yang diperoleh dengan akal pikiran juga pada hakekatnya anugerah dari Allah, terutama akal pikiran tersebut. Dengan pandangan seperti ini, maka orang yang memiliki ilmu tidak diperkenankan menyombongkan diri. Akan tetapi dengan ilmu tersebut, seseorang diharapkan akan banyak beramal dan semakin dekat kepada Allah serta mampu memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.

Dari klasifikasi ilmu yang telah dibuat oleh Ibn Khaldun tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa pemikirannya tentang kurikulum (materi pendidikan) memiliki karakteristik tersendiri. Mengenai karakteristik ini, Nana Jumhana (1998: 95-97) menyebutkan setidaknya ada empat hal yang menjadi karakteristik tersebut, yaitu: *Pertama*, tidak adanya pemisahan antara ilmu teoritis dengan ilmu praktis. Karakteristik ini tampak ketika Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *malakah* (penguasaan) yang terbentuk dari pengajaran ilmu atau pencarian keterampilan di dalam suatu industri tidak lain adalah buah dari aktivitas "intelektual fisik" di dalam satu waktu. Dengan demikian sesuai dengan pandangan modern yang mengatakan bahwa belajar harus melibatkan akal dan fisik secara serempak, dan belajar tidak akan sempurna jika hal ini tidak terjadi.

Kedua, adanya keseimbangan antara ilmu agama dengan ilmu aqliyah. Meskipun dia meletakkan ilmu agama pada tempat pertama ditinjau dari segi kegunaannya bagi murid, karena dapat membentuk kepribadiannya untuk hidup dengan baik, namun dia juga meletakkan ilmu 'aqliyyah pada tempat yang tidak kurang kemuliaan dan kepentingannya dari ilmu agama. Hal itu disebabkan ilmu 'aqliyah dihasilkan dari aktivitas akal yang merupakan pemberian terbesar dari Allah swt. kepada manusia.

Ketiga, berorientasi kepada anggapan bahwa tugas mengajar adalah alat terpuji untuk mencari rizki. Maka dia memasukkan tujuan baru dari pengajaran, yaitu sebagai sarana memperoleh rizki. Dengan demikian pandangannya jauh berbeda dengan tokoh pendidikan muslim sebelumnya, terutama al-Ghazali yang memandang bahwa orang yang menuntut ilmu dengan maksud menjadikannya sebagai alat mendapatkan rizki adalah suatu perbuatan tercela.

Keempat, kurikulumnya berorientasi untuk menjadikan pengajaran bersifat umum, mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan dengan tidak mengabaikan bahasa dan logika, sebagai alatnya. Dengan demikian kurikulum diharapkan memperoleh porsi

yang cukup dari pendidikan umum yang memungkinkannya untuk memperdalam studi selanjutnya yang lebih penting, dan yang hanya mungkin dapat ditekuni setelah dia memperoleh studi asasi yang cukup dalam aspek-aspek pengetahuan yang lain.

4. Metode Pendidikan

Ada beberapa metode pendidikan Ibn Khaldun yang dapat dirumuskan dari kitab Muqaddimah, yaitu:

a. Metode hafalan

Metode hafalan menjadi salah satu metode yang sering dipergunakan dalam pendidikan Islam. Namun menurut Ibn Khaldun (1993: 481) metode ini hanya digunakan dalam bidang-bidang tertentu saja, terutama dalam belajar bahasa, seperti dalam pengajaran bahasa Arab *Mudhar*—bahasa Arab yang asli dan dengannya al-Qur'an diturunkan—sebaiknya dimulai dengan menghafalkan ucapan purba bangsa Arab, yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, ucapan orang salaf, dan pidatonya orang-orang Arab serta sajak-sajak dan *sya'ir-sya'ir*. Setelah para pelajar itu hafal banyak tentang puisi dan prosa, mereka akan menjadi seperti orang-orang yang lahir dan besar di antara bangsa Arab dan belajar langsung cara menyatakan pendapat. Kemudian mereka harus mencoba melahirkan pikirannya sesuai bentuk dan susunan kalimat Arab yang baku. Menghafalkan dan melahirkan pendapat dengan cara demikian lalu sering diulang-ulang, akan memberikan kepada mereka suatu keahlian yang akan terus berkembang. Namun tidak semua bidang studi cocok dengan metode hafalan. Malah dalam bidang-bidang tertentu Ibn Khaldun mengkritik metode hafalan, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian sesudah ini.

b. Metode dialog

Ibn Khaldun (2000: 537-538) berpendapat bahwa metode yang paling tepat untuk menguasai suatu disiplin ilmu adalah metode dialog. Bahkan metode ini lebih dibutuhkan dari pada metode hafalan. Sebab, metode hafalan tidak akan membuat peserta didik menguasai tentang suatu persoalan sehingga ia tidak akan memiliki kemampuan (*malakah*) tentang suatu ilmu tersebut. Kemampuan (*malakah*) yang diperoleh melalui metode diskusi bersifat eksklusif dan hanya dimiliki oleh sarjana atau orang yang benar-benar mendalami disiplin ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, teori ini ia dukung dengan fakta yang ia temukan di Maghribi. Ketika itu, waktu yang ditentukan bagi para pelajar untuk tinggal di sekolah-sekolah yang ada di Maghribi, total selama enam belas tahun karena mereka lebih banyak menerapkan

metode hafalan. Sementara bagi mereka yang tinggal di Tunisia hanya lima tahun, sebab pendidikan yang mereka terapkan lebih didominasi dengan metode diskusi.

c. Metode Widya Wisata

Ibn Khaldun menceritakan bahwa pada masanya, orang menuntut ilmu dilakukan melalui 2 cara, yaitu: 1). Belajar mendapatkan ilmu dari kitab-kitab (buku-buku) yang dibacakan oleh guru-guru yang mengajar, lalu mereka mengistimbatkan permasalahan ilmu pengetahuan tersebut kepada murid-muridnya, dan 2) dengan jalan mengikuti para ulama terkenal yang mengarang kitab-kitab tersebut serta mendengarkan secara langsung pelajaran yang mereka berikan. Dari dua cara ini, Ibn Khaldun lebih menganjurkan cara kedua, yaitu melakukan perjalanan (*rihlah*) untuk menuntut ilmu, karena dengan cara ini anak didik akan mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan karakteristik eksploratif anak. Pengetahuan mereka yang berdasarkan observasi langsung itu akan berpengaruh besar dalam memperjelas pemahamannya terhadap pengetahuan lewat pengetahuan inderawinya (Ibn Khaldun, 2000: 765).

Dengan metode ini seseorang akan dapat mengobservasi pengetahuan secara langsung pada sumbernya, serta mendiskripsikan apa yang diamati secara langsung. Tujuan dari perlawatan ini ialah memperoleh pengalaman dan pengetahuan langsung dari sumbernya yang asli, meskipun caranya berlainan, namun tak diragukan lagi bahwa sesungguhnya menerima pelajaran dari para ulama yang mempunyai keahlian khusus di rumah mereka memberikan kepada pelajar suatu pandangan dan observasi khusus.

d. Metode keteladanan

Secara psikologis, manusia cenderung meniru karakter orang lain, terutama orang yang difigurkannya (an-Nahlawi, 1995: 263). Karena itu, metode keteladanan amat penting dalam proses pendidikan. Nana Jumhana (1998: 104) menyebutkan bahwa metode ini tampaknya disadari betul oleh Ibnu Khaldun yang menegaskan pentingnya keteladanan guru (pendidik) dalam proses pendidikan. Pentingnya metode ini dapat dilihat dari pernyataan Ibn Khaldun ketika bercerita tentang metode widya wisata di atas. Ia berpendapat bahwa kesempurnaan pendidikan akan diperoleh dengan pergi menuntut ilmu dan menemukan guru-guru paling berpengaruh agar dapat diteladani baik ilmu maupun akhlaknya (Ibn Khaldun, 2000: 765).

e. Metode pengulangan (al-tikrar) dan bertahap (al-tadrīj)

Menurut Ibn Khaldun, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada pelajar hendaknya didasarkan pada pandangan bahwa tahap permulaan pengetahuan adalah bersifat total (keseluruhan), kemudian secara bertahap, baru terperinci, sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami permasalahan pada tiap bagian dari ilmu yang diajarkan. Setelah itu guru menanamkan ilmu itu kepada pikirannya dengan penjelasan dan uraian-uraian sesuai dengan tingkat kemampuan berfikirnya serta kesiapan kemampuan menerima apa yang diajarkan.

Ia juga menuturkan bahwa metode ini dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: *pertama*, pendidik memberikan masalah-masalah yang menjadi topik pokok suatu bab lain menerangkan secara global/umum dengan memperhatikan kemampuan berpikir anak didik untuk memahaminya. *Kedua*, karena kemampuan anak didik masih lemah, maka pendidik hendaknya kembali mengemukakan pelajaran yang sama untuk kedua kalinya. Hanya saja dalam tahap ini pendidik memberikan pengajaran dalam bentuk yang lebih luas cakupannya, dengan memberikan komentar dan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan pandangan tentang objek kajian sehingga sampai pada akhir materi pelajaran. *Ketiga*, penguasaan anak didik terhadap materi yang diberikan telah semakin terlatih dan menguat, maka pendidik hendaknya kembali menerangkan materi pelajaran dengan mendalam, sehingga anak didik dapat memiliki keahlian dengan sempurna (Ibn Khaldun, 2000: 751-752).

Menurut Ali al-Jumbulati (1994: 200-201), metode tersebut benar-benar sejalan dengan teori-mengajar modern yang menyatakan bahwa mendidik anak perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan jiwanya di mana perkembangan jiwa tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara mengulang-ulangi akan membawa anak kepada ketelitian yang menjadi salah satu faktor dari sistem belajar praktis. Teori Gestalt, misalnya ditetapkan bahwa manusia mengamati benda-benda dengan secara keseluruhan pada permulaannya, kemudian semakin nampak rinciannya. Teori demikian telah diungkap oleh Ibnu Khaldun sebelum teori Gestalt.

Suwito dan Fauzan (2003: 259-260) juga mengungkapkan bahwa bila dianalisis secara mendetail metode yang dikemukakan Ibn Khaldun, memang relevan dengan pendapat para ahli pendidikan modern yang memunculkan metode-metode pengajaran, yaitu: *Pertama*, metode pentahapan (*al-tadrīj*), hal ini identik dengan al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Metode ini sesuai dengan kondisi psikologis manusia yang tidak dapat menerima *content* (materi) sekaligus dalam jumlah banyak,

tetapi sedikit demi sedikit. *Kedua*, metode pengulangan (*al-tikrar* atau *repetisi*). Walaupun termnya berbeda, al-Qur'an juga memakai metode repetisi seperti ketika al-Qur'an menampilkan cerita dalam ayat-ayatnya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, *al-Bukhari* meriwayatkan bahwa ketika wahyu pertama surat al-'Alaq/96 tepatnya ayat pertama diwahyukan, Nabi bersabda: *Aku tidak dapat membaca*. Daraz menyebutkan bahwa Nabi mengulangi sampai tiga kali apa yang diucapkan kepada malaikat ketika pertama kali mendatanginya di gua Hira'. Di kalangan para pendidik modern, metode ini dekat dengan metode evaluasi yaitu mengulang pelajaran yang telah disampaikan, untuk mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan para pelajar. *Ketiga*, dari dua metode yang telah disebutkan di atas, memungkinkan sekali hasil yang dicapai pelajar dapat menguasai secara tuntas terhadap materi yang telah diajarkan. Jadi jika dikaitkan dengan teori pendidikan modern, Ibn Khaldun telah melaksanakan pengajaran tuntas (*mastery learning*).

Dengan langkah-langkah tersebut Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa cara latihan yang sebaik-baiknya mengandung tiga kali ulang. Meskipun demikian, Ibn Khaldun (2000: 752) tetap menyadari bahwa dalam beberapa hal, ulangan yang berkali-kali itu memang dibutuhkan, tapi tergantung kepada keterampilan dan kecerdasan si murid.

f. Metode belajar al-Qur'an

Khusus dalam mengajarkan al-Qur'an kepada generasi muda, Ibn Khaldun memiliki pandangan sendiri yang jarang dikemukakan oleh ahli lain. Menurutnya, dalam mengajarkan al-Qur'an, umat Islam memiliki metode yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka tentang *ta'lim*. Ibn Khaldun mengomentari dan mengkritisi orang *ifriqiyah* (Afrika) dan *Maghribi* yang membatasi diri dalam belajar al-Qur'an tidak memperoleh keahlian berbahasa sama sekali. Sebab mereka hanya menekankan hafalan saja tanpa memahami *ushlub-ushlub* al-Qur'an dan mereka tidak berusaha memahami gaya bahasa (*balaghah*) yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Sementara orang-orang Andalusia yang memakai kurikulum campuran, membuat mereka agak menguasai bahasa Arab tetapi bekal mereka terhadap semua cabang ilmu pengetahuan cukup terbatas karena sikap mereka menjauh dalam mempelajari al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya mereka ahli *khath* dan kesusasteraan yang bermutu tinggi atau juga bermutu rendah, sesuai pendidikan sekunder yang mereka terima setelah pendidikan di masa anak-anak.

Ibn Khaldun lebih cenderung kepada pemahaman isi al-Qur'an secara integral, dan sangat tidak menyukai bila anak membaca al-Qur'an tetapi tidak paham akan

maksudnya. Oleh karena itu, ia menjadikan bahasa Arab sebagai dasar studi segala pengetahuan, bahkan ia mendahulukan pengajaran bahasa Arab ini dari pengetahuan-pengetahuan lain, termasuk al-Qur'an dan segala pengetahuan keagamaan. Menurutny, mendahulukan pelajaran al-Qur'an atas bahasa Arab hanya akan mengacaukan anak, sehingga anak hanya akan membaca tanpa mampu memahami, bahkan mungkin akan mengacaukan makna (Ibn Khaldun, 1993: 464).

2. Prinsip-prinsip Dasar Metode Pembelajaran

Jika ditelusuri pemikiran Ibn Khaldun tentang pendidikan dalam *Muqaddimah*, ditemukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan dan menerapkan metode pembelajaran. Muhammad Kosim (2013: 87-93) merumuskan ada delapan prinsip dasar dalam menerapkan metode pembelajaran menurut Ibn Khaldun, yaitu:

a. Mengajarkan materi dari yang inderawi kepada yang rasional

Ibn Khaldun (1993: 458) menganjurkan agar pendidik tidak mengajarkan anak-anak pemula dengan definisi-definisi yang rumit atau sulit serta kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pelajar tingkat pemula. Akan tetapi hendaknya memulai proses belajar mengajar dengan mendahulukan materi pelajaran yang dapat ditangkap oleh panca indera, setelah itu diteruskan kepada pelajaran yang rasional.

Menurutny, memberikan pemahaman kepada anak dengan kaidah dan norma-norma serta definisi-definisi yang sulit berarti menghadapkan anak kepada permasalahan ilmu secara sekaligus. Hal ini jelas belum dapat dimengerti oleh anak didik, karena usianya yang belum matang dan dapat mengakibatkan akal pikirannya merasa terbebani. Jika hal ini terjadi maka dapat menimbulkan rasa malas dalam diri pelajar. Dengan demikian akan mengakibatkan anak lari dari ilmu dan membencinya.

b. Menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran

Ibn Khaldun berpendapat bahwa pada umumnya para pelajar tidak sanggup menyerap definisi tentang sesuatu ilmu dengan definisi yang sebenarnya, kecuali beberapa orang saja. Oleh karenanya, ia (1993: 458) menawarkan agar pendidik memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami. Di antara contoh tersebut tentunya berupa alat-alat peraga yang mudah dimengerti oleh para pelajar.

Ali Al-Jumbulati (1994: 201) menanggapi tentang prinsip ini dengan mengatakan bahwa dalam pekerjaan mengajar, alat-alat peraga tersebut merupakan sarana pembuka cakrawala yang lebih luas, yang berlawanan dengan kebiasaan merumuskan kalimat-kalimat yang ditulis atau diucapkan. Di samping itu, alat peraga juga menjadikan

pengetahuan anak bersentuhan langsung dengan pengalaman indrawi yang hakiki. Dengan demikian Ibn Khaldun mendahului zamannya dengan pendapat-pendapat beliau yang terbukti sesuai dengan pandangan ilmu pendidikan modern.

c. Prinsip spesifikasi dan integrasi

Ibn Khaldun (1993: 458) memandang perlunya spesifikasi ilmu pengetahuan. Artinya, seorang pelajar mesti mengkhususkan kajiannya kepada satu bidang keilmuan. Sebab, apabila seorang pelajar dihadapkan kepada persoalan yang banyak sekaligus niscaya ia tidak akan sanggup memahami secara keseluruhan. Akibatnya, otaknya akan jemu dan tidak sanggup untuk beraktivitas sehingga bisa membuatnya meninggalkan ilmu yang sedang dipelajarinya.

Meskipun Ibn Khaldun menganjurkan untuk mengkaji ilmu pengetahuan secara khusus, bukan berarti ilmu yang lain diabaikan. Ia malah berpendapat bahwa pelajar yang telah menguasai suatu disiplin ilmu maka dia akan lebih siap untuk mempergunakan keahliannya dalam memahami cabang ilmu yang lain. Bahkan hal ini akan lebih banyak mengembangkan keinginan belajarnya di samping keahliannya akan meningkat tinggi lagi sehingga pemahamannya akan ilmu pengetahuan secara menyeluruh dapat tercapai.

Pada bagian lain, Ibn Khaldun (1993: 357-358) juga berpendapat bahwa banyaknya buku yang memuat berbagai istilah tentang suatu ilmu akan menghambat seorang pelajar untuk memperoleh ilmu. Idealnya, seorang pelajar mesti menghafal di luar kepala berbagai buku yang ada, paling tidak sebagian besar dari padanya, sesuai dengan bidang ilmunya. Akan tetapi, kebanyakan buku yang ada justru lebih banyak perbedaan pada istilah saja, sementara substansinya sama.

Adanya pembatasan Ibn Khaldun terhadap banyaknya buku yang dipelajari oleh peserta didik, tampaknya kurang tepat jika ditujukan kepada setiap peserta didik. Pandangan ini bisa dipakai untuk peserta didik tingkat pemula. Akan tetapi untuk peserta didik pada tahap lanjutan, tentunya diharapkan memiliki bacaan tentang berbagai buku sebagai karya-karya para ilmuan.

Dengan demikian, spesifikasi kepada satu bidang keilmuan yang ditawarkan Ibn Khaldun bukan berarti memisah-misahkan (*dichotomy*) antara satu disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Tetapi spesifikasi tersebut hanya bertujuan agar si pelajar memiliki kemampuan (*malakah*) yang kuat terhadap satu bidang disiplin ilmu. Sementara cabang ilmu yang lainnya tetap dipelajari dan dikuasai dengan terlebih dahulu menguasai satu disiplin ilmu dengan baik. Jadi, di sisi lain seorang pelajar dituntut untuk profesional dalam satu bidang ilmu, tetapi di sisi lain ia juga harus mengintegrasikan antara ilmu

yang ia kuasai dengan cabang ilmu yang lainnya. Dalam kajian mutakhir, pemikiran ini tampaknya relevan dengan paradigma integritas *transinterdisipliner* (Abuddin Nata, dkk, 2005: 179).

d. Prinsip kontinuitas dalam penyajian materi

Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa setiap pendidik seharusnya memperhatikan prinsip kontinuitas atau kesinambungan dalam menyajikan materi pelajaran yang sejenis kepada murid-muridnya. Dengan demikian antara penyajian suatu materi ke materi lainnya hendaknya tidak ada jarak waktu yang terlalu lama, sebab hal itu dapat menyebabkan murid lupa terhadap materi-materi sebelumnya.

Jika terjadi selang waktu yang cukup lama, Ibn Khaldun (1993: 458) mengatakan bahwa hal ini akan memberi peluang munculnya sifat pelupa kepada pelajar sehingga menceraiberaikan dan membuat terputus-putusnya berbagai bagian ilmu yang sedang dipelajari sehingga keahlian dalam bidang ilmu yang bersangkutan sulit untuk diperoleh.

e. Tidak mencampuradukkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu

Sejalan dengan prinsip spesifikasi dan integrasi di atas, Ibn Khaldun (1993: 458-459) menegaskan seorang guru agar tidak mencampuradukkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu sekaligus. Menurutnya, mengajarkan dua atau lebih ilmu pengetahuan dalam satu waktu hanya akan membingungkan bagi peserta didik. Sebab metode seperti itu akan sukar sekali dikuasai oleh peserta didik dan perhatiannya akan terbagi dan dapat terganggu oleh satu ilmu dengan yang lainnya.

Menanggapi pendapat Ibn Khaldun ini, Nana Jumhana (1998: 155) berpendapat bahwa dalam pandangan metode pendidikan modern, pernyataan Ibnu Khaldun di atas, tampaknya tidak bisa berjalan selaras, sebab pendidikan modern justru menganjurkan agar memberikan pengetahuan yang bervariasi dalam berbagai kurikulum. Menurut hemat penulis, pendapat Ibn Khaldun bukan berarti mengenyampingkan kurikulum yang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa spesifikasi bukan berarti dikotomi. Penolakan Ibn Khaldun terhadap sistem pengajaran yang mencampur-adukkan antara dua materi dalam satu waktu didorong oleh kekhawatiran akan kemampuan anak didik dalam menguasai satu bidang ilmu tertentu. Sebaliknya, tidak terdapat larangan yang tegas dari Ibn Khaldun untuk sekedar memperkenalkan dasar-dasar ilmu yang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nana Jumhana. Jika kurikulum yang ingin diterapkan secara bervariasi tidaklah dilarang selagi tidak mengganggu atau menghambat seseorang dalam menguasai satu bidang keilmuan tertentu.

f. Menghindari kekerasan terhadap peserta didik

Ibnu Khaldun (2000: 763) mengharuskan kepada guru agar bersikap kasih-sayang kepada anak dan tidak menggunakan kekerasan terhadap mereka, karena sikap kasar atau kekerasan dalam mengajar membahayakan jasmani anak (peserta didik). Jika anak diperlakukan secara kasar dan keras, menjadi sempit hatinya, dan hilang kecerdasannya, bahkan ia akan terdorong untuk berdusta, malas, dan berbuat kotor.

Meskipun demikian, Ibn Khaldun juga membolehkan memberlakukan sanksi (*punishment*), tetapi sanksi tersebut bersifat edukatif. Sanksi ini hendaknya diterapkan oleh guru dalam keadaan terpaksa karena tak ada jalan lain, (sesudah semua cara yang lemah-lembut tidak berhasil). Dengan begitu, hukuman menjadi salah satu alat atau metode dalam pendidikan Islam.

g. Jangan mengajarkan ilmu dari hasil ringkasannya

Para sarjana di zaman Ibn Khaldun, telah banyak yang membuat ringkasan dari berbagai buku, atau yang disebut dengan *mukhtashar*. Buku-buku ringkasan ini memuat susunan sejumlah permasalahan pokok yang dibahas berikut judul buku bukunya. Bentuknya sangat ringkas, dan tiap kalimat berisi banyak rumusan tentang masalah pokok tadi. Namun menurut Ibn Khaldun cara ini merugikan, bukan saja terhadap gaya bahasa buku aslinya yang baik, *balaghah*, tetapi juga kepada pengertiannya.

Mungkin para sarjana itu melakukan ringkasan seperti ini untuk mempermudah para peserta didiknya dalam memahami buku tersebut. Kenyataannya tidaklah demikian, sebab buku induk yang biasanya diringkas sangatlah panjang dan membutuhkan menafsiran. Jika buku tersebut diajarkan kepada peserta didik dalam bentuk ringkasannya saja, maka peserta didik akan mengalami kerepotan. Cara ini hanya akan memaksa mereka untuk memahami pikiran yang tersimpul dalam istilah-istilah yang ringkas, membingungkan, dan padat arti. Mereka harus menguraikan sejumlah persoalan yang tersembunyi di balik kata yang digunakan. Karena itu, teks buku-buku ringkasan itu cukup menyukarkan dan membingungkan sehingga, banyak waktu habis untuk mencoba memahaminya (Ibn Khaldun, 1993: 457-458).

Untuk itu, jika mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didik, hendaknya dengan buku induknya (sumber primer). Dengan begitu, peserta didik mampu memahami esensi dari buku itu sendiri bukan justru memahami isi buku tersebut dari orang lain. Pandangan ini sesuai dengan teori pendidikan modern, terutama dalam penelitian di mana seorang peneliti dianjurkan untuk memiliki buku primer sebagai referensi utama. Buku primer tersebut adalah buku induk seperti yang disebutkan oleh Ibn Khaldun. Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa Ibn Khaldun berpandangan bahwa setiap pelajar yang

menuntut ilmu seharusnya menguasai suatu disiplin ilmu secara utuh, bukan secara parsial yang mengakibatkannya berpandangan picik lalu mengkalim kebenaran pada dirinya sendiri dan mudah menyalahkan orang lain.

h. Mempelajari ilmu alat sebaiknya tidak menjadi tujuan utama

Ibn Khaldun berpendapat bahwa tanpa mempelajari ilmu alat, akan sulit menguasai suatu disiplin ilmu yang dituju. Ilmu bahasa, misalnya, ia mengakui bahwa seseorang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Arab mendapatkan kesukaran memperoleh ilmu pengetahuan, jika dibandingkan yang berbicara bahasa Arab sejak awal. Namun setiap pendidik mesti memberi motivasi kepada anak didiknya bahwa ilmu itu bukanlah sebagai tujuan sehingga tidak diperlukan waktu yang berlama-lama. Ibn Khaldun menegaskan bahwa jika saja para pelajar menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu alat, lalu kapan mereka mengejar ilmu yang merupakan tujuan? Karena itu, para guru ilmu alat hendaknya tidak menyelam terlalu dalam di dalam ilmu-ilmu alat itu, dan tidak menambah jumlah permasalahannya.

Adanya batasan yang dilakukan oleh Ibn Khaldun dalam mempelajari ilmu alat bukan berarti menghambat minat seseorang yang ingin ahli di bidang ilmu alat. Ibn Khaldun (1993: 461) juga menegaskan bahwa bagi mereka yang berhasrat mendalaminya lebih jauh dan menganggap dirinya mampu melakukannya, boleh memilih jalan tersebut. Bagi yang berhasrat menjadi guru bahasa Arab, misalnya, tentu dituntut untuk mendalami ilmu alat tersebut sehingga ia memiliki kompetensi untuk mengajarkannya kepada peserta didiknya.

Dari beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun ternyata sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dikenal dalam pendidikan dewasa ini. Dengan jelas Ibn Khaldun memperhatikan psikologi perkembangan jiwa anak, keragaman materi, serta tingkat kemampuan peserta didik baik yang diakibatkan oleh tempat tinggalnya maupun yang disebabkan oleh kemampuan berpikirnya.

5. Pendidik dan Peserta didik

Jika ditelusuri kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dapat dirumuskan bahwa seorang pendidik hendaknya melakukan hal-hal berikut.

- a. Seorang guru mesti menjadi teladan bagi anak didiknya karena keteladanan dari seorang guru akan sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak didik.
- b. Seorang guru mesti menguasai metode yang relevan dalam mendidik anak didik. Guru juga dituntut untuk memilih dan menggunakan metode secara tepat.

- c. Guru mesti memiliki kompetensi di bidang keilmuannya sehingga ia mampu mengajarkan kepada anak didiknya.
- d. Guru diharapkan mendidik anak didiknya dengan penuh kasih sayang. Anak didik tidak boleh diperlakukan dengan kasar dan keras sebab hal itu dapat merusak mental mereka.
- e. Guru harus memperhatikan psikologi anak didik dan memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi psikisnya sehingga proses pembelajaran tidak membosankan melainkan menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik.
- f. Hendaklah guru memberikan motivasi kepada anak didiknya dalam menuntut ilmu sehingga mereka tidak putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami pelajaran (lihat Muhammad Kosim, 2012: 107-108).

Selain itu, Ibn Khaldun (1993: 481) juga memandang bahwa guru adalah profesi, untuk itu berhak mendapatkan upah. Mengenai hal ini, ia memandang bahwa mengajar adalah salah satu keahlian dan dikelompokkan ke dalam pertukangan. Karena bersifat keahlian, maka semakin orang butuh kepadanya maka semakin besar pula upah yang diberikan kepadanya.

Adapun peserta didik, hendaknya melakukan hal-hal berikut:

- a. peserta didik hendaknya memahami bahwa semua kemampuan yang ia ada pada dirinya adalah semata-mata anugerah dari Allah.
- b. hendaklah peserta didik tidak mengagung-agungkan logika, sebab logika hanya alat untuk mencari pengetahuan. Ibn Khaldun menegaskan bahwa fungsi logika mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, akan tetapi logika bukan satu-satunya yang menentukan untuk menemukan suatu "kebenaran".
- c. setiap pelajar harus mencapai tujuan pendidikan, meskipun dihadapkan kepada berbagai macam rintangan. Pelajar mesti mampu menghadapi segala rintangan tersebut tanpa harus berhenti dalam menuntut ilmu pengetahuan.
- d. jangan ragu-ragu dalam mencari kebenaran atau menuntut ilmu sebab keragu-raguan akan membuat pelajar gagal dalam mencapai tujuan. Pesan ini mengajak peserta didik untuk istiqamah dalam berupaya untuk memperoleh suatu kebenaran.
- e. apabila seorang pelajar mengalami kebingungan dan kesukaran untuk menemukan kebenaran, maka tinggalkanlah berpikir secara logic yang relatif itu (lihat Muhammad Kosim, 2012: 109-110).

6. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua hendaknya menyerahkan anaknya untuk menuntut ilmu kepada guru. Seyogyanya, terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, dan orang tua bisa menyampaikan harapan-harapannya kepada guru tersebut dalam upaya mendidik anaknya. Sebaliknya, guru juga dapat menerima saran dan pesan dari orang tua anak didik, sehingga proses pendidikan yang diberikan berjalan dengan lebih baik.

Demikian pula masyarakat dituntut untuk memelihara dan mengembangkan tradisi keilmuan selama ia menginginkan masyarakatnya terdepan. Jika tidak, maka peradaban akan merosot seiring dengan terbengkalainya pendidikan yang ada di tempatnya. Menurutny, masyarakat—dalam hal ini pergaulan—bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Ibn Khaldun (2000: 527) menuliskan, “Dia dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi dilakukan dalam pergaulan, hingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan.” Pandangan seperti ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dituntut terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan pendidikan generasi mudanya.

Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun terhadap Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam merupakan sub sistem yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sebagaimana yang menjadi tujuan utama Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun peran pendidikan Islam tersebut perlu dipertegas sehingga kontribusinya dalam membangun bangsa yang berperadaban, sebagaimana cita-cita Islam sendiri, dapat terwujud. Bagaimana pun juga hubungan antara peradaban erat kaitannya dengan kehadiran Islam, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Upaya itu tampaknya dilakukan oleh Ibn Khaldun sebagaimana pokok-pokok pikiran di atas. Jika dilihat dalam konteks keindonesiaan saat ini, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa relevansi antara keduanya.

1. Relevansi Hakikat Manusia dan Tujuan Pendidikan Islam

Pandangan pendidikan Islam terhadap manusia tampaknya tidak bertentangan dengan pandangan pendidikan nasional. Apa yang menjadi tujuan dalam pendidikan nasional juga menjadi tujuan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan nasional—termasuk pendidikan Islam—

menghendaki agar berkembangnya potensi peserta didik sehingga menjadi “manusia yang ideal”. “Manusia yang ideal” dalam pandangan Sisdiknas ini adalah manusia yang memiliki integritas kepribadian yang, setidaknya, terdiri dari 10 kriteria, yaitu: 1) Beriman, 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) berakhlak mulia, 4) sehat, 5) berilmu, 6) cakap, 7) kreatif, 8) mandiri, 9) demokratis, dan 10) bertanggung jawab.

Dari sepuluh kriteria tersebut, secara eksplisit memang tidak persis sama dengan kriteria manusia yang ideal yang disebutkan oleh Ibn Khaldun. Tetapi secara substansi, kriteria tersebut tidaklah memiliki perbedaan yang bertolak belakang.

Hanya saja, dalam konteks keindonesiaan, relevansi konsep yang ideal itu masih bersifat teoritis. Sementara dalam pelaksanaannya, manusia masih dipandang secara parsial. Akibatnya, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan mengalami hambatan dalam pencapaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa antara yang ideal tidak sesuai dengan realita.

Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan kepada aspek kognitif. Sementara aspek kognitif yang merupakan potensi akal hanya merupakan satu bagian dari kepribadian manusia. Akibatnya, pendidikan kurang berhasil melahirkan *out come* yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan. Pendidikan Islam dewasa ini mendapat sorotan yang tajam dari sebagian masyarakat, terutama terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Hal ini didasari oleh adanya fenomena sosial berupa banyaknya perilaku penyimpangan moral—seperti praktek KKN, politik praktis-pragmatis, konflik SARA, dan sebagainya—yang pelakunya justru dilakukan oleh kaum terpelajar dan merupakan *out put* dari lembaga pendidikan Islam. Fenomena ini pada gilirannya menimbulkan pandangan bahwa pendidikan Islam hanya sekedar *transfer of knowledge* saja, tanpa mampu melakukan *transfer of values* dan *internalisation of values* (Muhammad Kosim, 2012: 128).

Untuk itu, pendidikan Islam di Indonesia perlu melakukan reorientasi terhadap tujuannya. Disebut reorientasi karena konsep dasar pendidikan Islam tentang tujuan telah jelas, sebagaimana pandangannya tentang manusia di atas. Dalam hal ini, perlu dibangun kembali paradigma holistik-integralistik. Paradigma ini memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Manusia dipandang sebagai kesatuan yang bulat, yakni kesatuan jasmani-ruhani, kesatuan makhluk pribadi-makhluk sosial-makhluk Tuhan, kesatuan melangsungkan, mempertentangkan, dan mengembangkan hidupnya. Dengan paradigma ini, maka tujuan pendidikannya akan mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan

masyarakat seutuhnya (Ali Maksum dan Luluk Ruhendi, 2004: 186-187). Namun yang terpenting dari semua itu adalah kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya mestinya tetap mengacu kepada konsep dasar tentang hakikat manusia tersebut. Disinilah diperlukannya konsistensi antara teori dengan praktek.

2. Relevansi Ilmu dan Kurikulum

Jika Ibn Khaldun membagi ilmu secara garis besar ke dalam dua bentuk, *al-‘ulum al-naqliyah* dan *al-ulum al-aqliyah*, maka di Indonesia juga dibagi kepada dua bentuk, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Kedua bentuk ilmu ini menjadi bagian dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia, dikenal adanya lima aspek materi pokok Pendidikan Agama Islam, yaitu: al-Qur’an, Aqidah, Akhlak, Syariah (Ibadah) dan Tarikh Islam. Pada sekolah umum, seperti SD, SMP, dan SMA materi itu digabungkan ke dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam. Sementara di Madrasah, lima aspek di atas dikelompokkan lagi menjadi lima bidang studi, yaitu Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab (Muhaimin, 2003: 187).

Klasifikasi ilmu-ilmu agama ke dalam bentuk bidang studi juga mengalami perbedaan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan agama Islam. Akan tetapi, lima aspek materi pokok tetap terintegrasi dalam bidang studi pendidikan agama Islam yang diajarkan, hanya saja porsi nya berbeda antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum, terutama jumlah jam tatap muka dalam kegiatan intrakurikuler.

Pengklasifikasian ini bisa menimbulkan dilema baru, di mana umat Islam terjebak pada sistem pendidikan yang dikotomis. Jika pengelompokan itu hanya sekedar “pemilahan” spesifikasi ilmu pengetahuan—seperti yang dilakukan oleh Ibn Khaldun atau al-Ghazali—tidaklah menjadi persoalan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengelompokan itu justru berimplikasi kepada adanya dikotomi ilmu pengetahuan dalam artian terjadinya pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan (Mujamil Qamar, 2005: 74), sebagaimana yang terjadi di dunia Barat. Dikotomi ilmu yang terjadi di Barat mengakibatkan sains modern Barat sering menganggap rendah status keilmuan ilmu-ilmu keagamaan, yang dianggap tidak ilmiah karena objek-objeknya tidak empiris (Mulyadi Kartanegara, 2005: 20).

Menyikapi persoalan ini, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengintegrasikan kedua kelompok ilmu tersebut. Beberapa upaya tersebut telah mulai dirintis oleh pemegang kebijakan dan tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan konversi IAIN atau STAIN menjadi UIN. Di antara alasan

penting yang melatarbelakangi konversi ini adalah untuk mengatasi dikotomi tersebut. Dalam hal ini Abuddin Nata (2003: 65) menyebutkan bahwa dikotomi ilmu dapat diatasi dengan program integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, dengan cara merubah IAIN menjadi UIN. Menurutnya, IAIN hanya menyelenggarakan program studi agama saja. Hal ini dinilai hanya melestarikan dikotomi tersebut. Upaya ini telah mulai dirintis oleh beberapa PTAI seperti UIN Malang yang sebelumnya STAIN, kemudian beberapa IAIN menjadi UIN, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sutan Syarif Kasim Pekanbaru atau UIN Sumatera Utara.

Selain itu, perlu membangun kembali paradigma yang utuh tentang hakikat ilmu. Paradigma tersebut tentunya kembali kepada konsep dasar ajaran Islam yang memandang ilmu secara integral-holistik. Hakikat ilmu adalah kebenaran, dan sumber kebenaran adalah Allah SWT yang Mahabener lagi Maha Mengetahui. Jadi ilmu di pandang melalui prinsip Tauhid, di mana segala sesuatu yang benar hanya berasal dari Allah 'Azza Wa Jalla semata. Selain memandang ilmu dengan prinsip tauhid, dapat juga dilihat isi atau kandungan al-Qur'an yang diyakini mutlak kebenarannya. Ternyata dalam al-Quran tidak hanya mengandung ajaran pada aspek ibadah saja, tetapi al-Quran juga banyak bercerita tentang sains dan teknologi mulai dari hakikat penciptaan manusia, penciptaan alam beserta isinya hingga kepada angkasa luar (Muhammad Kosim, 2012: 136-137).

Jika ditelusuri lebih jauh, Allah SWT memandang baik al-Quran dan alam semesta sebagai tanda-tanda (ayat) Tuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwa baik ilmu-ilmu agama (yang bersifat Qauliyah/Quraniyah) maupun ilmu-ilmu umum (yang bersifat Kauniyah) sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Karena sama-sama ayat Allah, maka keduanya merujuk pada realitas sejati, Allah SWT dan Dialah yang menjadi objek penelitian setiap ilmu baik yang bersifat naqliyah maupun aqliyah. Di sinilah letak basis integrasi mereka, di satu pihak berupa kitab, di pihak lain berupa alam semesta (Mulyadi Kartanegara, 2005: 20-44).

Jadi masing-masing ilmu ini tidaklah bersifat eksklusif, tetapi saling merasuk antara satu sama lain. Meskipun keduanya berasal dari satu sumber dan sebagai ayat-ayat Tuhan, keduanya juga memiliki perbedaan, ayat *qauliyah* dalam bentuk verbal (tertulis), sedangkan ayat *kauniyah* berupa realitas-realitas (fisik dan non fisik) yang tercipta, maka metode untuk mengetahui suatu ilmu antara keduanya tentu berbeda.

Kalau basis integrasi antara keduanya telah ditemukan, maka sistem pendidikan mestinya dirancang sedemikian rupa dalam konteks persatuan/integrasi ilmu, bukan justru dikotomi ilmu yang saling mengingkari kebenaran ilmu yang satu dengan ilmu

yang lain. Seperti perkembangan pendidikan di Indonesia, walaupun lembaga pendidikan terbagi dua: sekolah berciri khas agama, seperti MI, MTs, MA, IAIN dsb; dan sekolah umum, seperti SD, SMP, SMA, UI dsb, hendaknya memperkenalkan paradigma ini sejak awal. Jika paradigma semacam ini sudah tertanam maka para pelajar di sekolah agama akan dituntut kreativitasnya untuk mengenal lebih jauh lagi tentang ilmu alam atau yang bersifat sains dan teknologi, sehingga ia mampu beradaptasi dengannya. Sebaliknya mereka yang menuntut ilmu di sekolah umum akan menguasai suatu ilmu dengan tetap menemukan kebenaran hakiki artinya, ilmu yang dikuasainya tidak menyebabkan dan mengantarkannya kepada kekafiran, tetapi justru kepada tingkat yang mulia yaitu beriman dan berilmu. Ketika ia mengkaji tentang alam, seyogyanya ia berpikir siapa yang menjadikan itu semua. Ketakjubannya terhadap penemuan-penemuan ilmiah, semakin ia mengenal akan kebesaran Tuhannya (Muhammad Kosim, 2005: 5).

Selain itu, perlu pula dibangun kesadaran bersama antar pengelola pendidikan, khususnya guru-guru beragama Islam. Terlepas ilmu apa yang mereka bimbing, tetapi memiliki tanggungjawab yang sama dalam membina akhlak Islami peserta didik. Bukan justru mengkambinghitamkan persoalan akhlak kepada guru agama *an sich*.

3. Relevansi Metode Pendidikan

Persoalan metode tampaknya terus menjadi bahan diskusi yang tetap aktual. Apalagi Mahmud Yunus menyebut bahwa metode lebih penting dari pada materi (*at-thariqatu ahammu minal maddah*). Untuk itu metode mesti dikembangkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Seperti yang diungkapkan oleh Mastuhu (1999: 35), metode belajar yang digunakan selama ini masih bersifat “klasik”, yaitu mewariskan sejumlah materi ajaran agama yang diyakini benar untuk disampaikan kepada peserta didik tanpa memberikan kesempatan kepadanya agar disikapi secara kritis. Maka metode belajar dan mengajar sistem pendidikan Islam bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengayaan materi, sehingga ilmu lebih dipandang dari segi hasil dari pada proses.

Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia selama ini masih butuh pembenahan dan pengembangan metode mengajar. Apa saja yang pernah dikritik oleh Ibn Khaldun, seperti menggunakan metode hafalan pada bidang yang tidak tepat, juga dirasakan oleh Mastuhu pada saat ini. Demikian juga prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun, jika dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh Mastuhu, juga tidak jauh berbeda. Ini menunjukkan bahwa konsep yang diberikan oleh Ibn Khaldun belum terlaksana dengan sepenuhnya. Itu artinya pemikiran Ibn Khaldun tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.

Namun, metode hafalan tetap dibutuhkan untuk melahirkan para ilmun, terutama ulama, dalam menguasai dalil-dalil syara'. Kelangkaan ulama yang banyak dirasakan umat Islam belakangan ini juga turut disebabkan oleh lemahnya kemampuan ulama dalam menghafal dalil-dalil syara' untuk berhujjah dan mengemukakan fatwa di tengah-tengah umat. Karena itu, metode hafalan tetap dibutuhkan di sekolah/madrasah, terutama dalam menguasai dalil naqli, khususnya ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi.

Di samping itu pemikiran Ibn Khaldun yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan metode pendidikan Islam di Indonesia adalah tentang belajar al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa untuk belajar al-Qur'an sebaiknya didahului dengan memahami bahasa Arab, sehingga belajar al-Qur'an nantinya bukan hanya sekedar membaca secara tekstual, tetapi bisa dipahami dan diinterpretasikan untuk diamalkan. Secara umum, pemikiran ini belum terlaksana di Indonesia, yang terjadi justru seperti yang dikritiknya tersebut. Sementara di sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah atau pesantren, kemampuan dan hasil belajar bahasa Arabnya tidak begitu membanggakan. Lebih ironis lagi, generasi muda Islam yang belajar di sekolah umum, umumnya tidak mendapatkan tentang ilmu bahasa Arab. Akibatnya, mereka hanya membaca al-Qur'an secara tekstual semata.

Menyikapi persoalan ini, tampaknya perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum, dengan memberikan perhatian yang besar terhadap bidang studi bahasa Arab ke dalam kurikulum yang dimulai sejak usia dini. Setiap generasi muslim hendaknya dibekali dengan pelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini para guru perlu mengembangkan metode yang tepat guna untuk mengajarkannya. Begitu juga di madrasah, pendidikan bahasa juga ditingkatkan, bukan sebagai tujuan, seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, tetapi sebagai alat untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam memahami al-Qur'an.

Lebih-lebih lagi di PTAI, tidak dapat dipungkiri jika mahasiswa di PTAI tidak semuanya mampu berbahasa Arab. Semestinya PTAI, seperti IAIN, STAIN atau UIN melakukan seleksi yang ketat terhadap *in put* mahasiswanya sehingga kelak mereka memiliki keahlian (*malakah*) tentang ilmunya. Atau, jika tidak melakukan seleksi, pihak PTAI mesti memberikan pendidikan yang tepat guna pula untuk mendidik mereka aktif berbahasa Arab (Muhammad Kosim, 2012: 142).

Pemikiran lain yang perlu mendapat perhatian besar dari Ibn Khaldun adalah tentang perlunya spesifikasi keilmuan, yaitu ahli dalam bidang keilmuan tertentu. Dalam hal ini, Ibn Khaldun menyebutkan harus dilakukan secara *tadarruj*, bertahap dan sedikit

demi sedikit, bukan sekaligus. Kemudian jangan mengajarkan banyak ilmu sekaligus karena itu akan menghambatnya untuk menguasai satu bidang ilmu secara utuh.

Tampaknya, di tingkat perguruan tinggi, spesifikasi keilmuan lebih banyak yang dihasilkan oleh PTU dari pada PTAI. Bidang pendidikan, misalnya, di PTU dikenal adanya administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, kurikulum pendidikan dan Bimbingan Konseling. Sementara di PTAI yang lebih dikenal hanyalah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, atau Bimbingan Konseling Islam. Bahkan untuk Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam hanya dikenal Konsentrasi Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Itu artinya, konsentrasi ini harus dipersiapkan untuk memahami banyak cabang keilmuan yang ada dalam pendidikan tersebut, seperti administrasi, kurikulum, dan media, sebagaimana yang telah dispesifikasi oleh PTU. Tentu spesifikasi keilmuan ini bukan mengenyampingkan keilmuan lain, melainkan untuk menghasilkan ilmuan yang memiliki spesialisasi keilmuan tertentu secara mendalam.

4. Relevansi Guru, Peserta Didik, dan Masyarakat

Meskipun Ibn Khaldun tidak khusus berbicara tentang guru dengan peserta didik, tetapi konsep yang ia tawarkan tetap relevan untuk dikaji dan dikembangkan dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa guru dituntut untuk mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian guru dituntut untuk memperhatikan kondisi psikologis peserta didik lalu mendidiknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Hal inilah yang dibutuhkan dalam kompetensi guru agama saat ini.

Di samping itu, bangsa ini butuh guru yang berkarakter. Jika setengah dekade terakhir pemerintah mengangkat kembali tema pendidikan karakter di sekolah/madrasah, tetapi perlu disadari bahwa karakter guru itulah yang menjadi kunci utamanya. Tanpa keteladanan dari guru, maka sulit membentuk karakter peserta didik.

Adapun peserta didik, diharapkan agar menyadari bahwa ilmu yang dituntut adalah karunia Allah semata, rajin menuntut ilmu, tidak pesimis, dan tidak tergantung pada kekuatan logika. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual semata, tetapi mesti cerdas secara emosional, spiritual, dan terpenting lagi cerdas secara religius sehingga jadilah ia sebagai anak yang shaleh. Inilah profil peserta didik yang ideal dan senantiasa diharapkan sebagaimana yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional (Muhammad Kosim, 2012: 144).

Orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, pendidikan dari orang tua biasanya disebut dengan lembaga pendidikan

informal, sementara sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Meskipun anaknya telah diamanahkan untuk dididik di suatu sekolah, tetapi bukan berarti tanggung jawab orang tua lepas begitu saja. Mesti ada koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Koordinasi dan kerja sama ini, khususnya antara orang tua dan guru, telah dibicarakan oleh Ibn Khaldun.

Begitu juga masyarakat, memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah juga menyadari akan pentingnya peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, dalam Sisdiknas, termasuk Pendidikan Islam, mengadakan kerja sama dengan masyarakat dengan dibentuknya komite sekolah dan dewan pendidikan. Dalam UU Sisdiknas Bab I pasal 1 ayat 25 disebutkan, “Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.” Kemudian pada ayat 27 disebutkan pula, “Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia Nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengurus lembaga pendidikan formal sehingga terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah (termasuk guru), orang tua, dan masyarakat setempat. Karena itu, diperkenalkan konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*) untuk memberdayakan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pendidikan formal.

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam pun, kondisi ini telah lama terbentuk. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat atas bantuan dari masyarakat. Pendidikan Berbasis Masyarakat bukan konsep baru dalam pendidikan Islam di Indonesia, karena hal itu telah terjadi secara alamiah.

Dari kenyataan ini, maka konsep yang terakhir dikemukakan oleh Ibn Khaldun memiliki relevansi yang jelas dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini. Hanya saja, pelaksanaan dari konsep tersebut belum berjalan optimal, sehingga demokratisasi pendidikan masih lebih merupakan konsep dan wacana yang diharapkan segera berubah. Meskipun terjadi kerja sama yang baik antara masyarakat dan sekolah, tetapi masyarakat kecil terkadang tidak mendapatkan tempat untuk mengenyam pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dianggap unggul dan terdepan justru menawarkan program dengan ongkos yang sangat mahal. Akibatnya, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan yang dapat menikmatinya. Sementara si miskin cenderung memperoleh kesempatan pendidikan di sekolah-sekolah yang terbelakang. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya mencerdaskan masyarakat, tanpa diskriminasi terhadap kaum yang lemah. Sebaliknya,

masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi, mendukung, dan memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia (Muhammad Kosim, 2012: 146). Dengan begitu, pendidikan Islam dalam Sisdiknas memiliki peran penting dan menentukan kualitas Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri.

Penutup

Setelah melacak pemikiran Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, dari beberapa komponen pendidikan Islam, Ibn Khaldun membicarakan beberapa komponen pendidikan Islam dalam kitab *Muqaddimah*-nya, yaitu tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, kurikulum, hakikat ilmu, metode pengajaran, pendidik, peserta didik, orang tua, dan peran masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun pantas disebut sebagai tokoh pendidikan Islam.

Kedua, berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi dengan pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Relevansi tersebut dapat dilihat dari dua hal, *pertama*, pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi dengan pelaksanaan pendidikan Islam yang telah ada dan sedang dilaksanakan; dan *kedua*, pemikiran Ibn Khaldun akan tetap relevan untuk diaktualisasikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam dewasa ini. Artinya, relevansi dalam bentuk pertama ada kesesuaian antara konsep pendidikan Ibn Khaldun dengan hal-hal yang telah diterapkan di Indonesia. Namun ada pula teorinya yang belum, atau malah tidak, dilaksanakan padahal pemikiran tersebut masih relevan dan diperlukan saat ini, seperti perlunya belajar bahasa Arab sebagai alat untuk memahami al-Qur'an dan hendaknya mengajarkan ilmu serinci mungkin dengan sistematis dan kontiniu, bukan bercampur, seperti bidang studi PAI di sekolah umum dengan mencakup berbagai bidang ilmu di dalamnya. Relevansi bentuk kedua inilah yang harus didiskusikan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti dalam rangka pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Ketiga, peran pendidikan Islam dalam Sisdiknas mesti dipertegas dengan memberi warna bagi praktik keilmuan yang dilakukan. Pendidikan Islam bukan saja mengajarkan ilmu-ilmu syari'at semata, akan tetapi segala ilmu sesungguhnya berasal dari Allah SWT. Konsekuensinya, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan lewat lembaga pendidikan mampu mengantarkan manusia kepada kepatuhan dan

ketundukan kepada Allah SWT sehingga ilmu yang dihasilkan memberi kontribusi positif terhadap pembentukan masyarakat yang madani dalam ampunan dan ridha-Nya.

Daftar Pustaka

- Affandi, Hakimul Ikhwan.(2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Ahwani, Ahmad Fuad.(1997). *Filsafat Islam*, Penj, Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Ke-8
- Arifin, Imron.(1993). *Kepemimpinan Kyai; Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasahada Press.
- Dasoeki, Thawil Akhyar.(1993). *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*, Semarang: Toha Putra.
- Jumhana, Nana.(1998). *Paradigma Pendidikan Islam dan Barat; Studi Perbandingan Pemikiran Pendidikan Ibn Khaldun dan John Dewey*, (Tesis), Padang: PPs IAIN “TB”.
- al-Jumbulati, Ali.(1994). *Perbandingan Pendidikan Islam*, Penj. H.M. Arifin, diterjemahkan dari *Dirasatun Muqaaranatun fit-Tarbiyyatil Islamiyyah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, Mulyadi.(2005). *Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Bandung: Mizan.
- Khaldun, Abdurrahman Ibn.(1993). *Muqaddimah Ibn Khaldūn; wa Hiya Muqaddimah al-Kitāb al-Musamma Kitāb al-Ibar wa Dīwān al-Mubtada’ wa al-Khabar fī Ayyām al-Arb wa al-‘Ajām wa al-Barbar wa Man ‘Āsharahum min Dzawī al-Sulthān al-Akbar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Khaldun, Ibn.(2000). *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Penj, Ahmad Thoha, Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Kosim, Muhammad.(2005). *Integrasi Ilmu Umum dan Agama*, Harian Haluan: 23 September.
- _____.(2013). *Metode Pendidikan Menurut Ibn Khaldun*, dalam Murkilim, Ahmad Rivauzi dan Muhammad Kosim, *Konsepsi dan Pemikiran Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai*, Padang, Jasa Surya.
- _____.(2012). *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun; Kritis, Humanis dan Religius*, Jakarta Rineka Cipta.
- Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi.(2004). *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern, Mencari “Visi Baru” atas “Realitas Baru” Pendidikan Kita*, Yogyakarta: IRCiSoD.

- Mas'ud, Abdurrahman.(2002). *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mastuhu.(1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Shofan, Moh.(2004). *Pendidikan Berparadigma Profetik, Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhaimin.(2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa.
- An-Nahlawi, Abdurrahman.(1995). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Penj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nata, Abuddin.(2003). *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nizar, Samsul, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, dalam Jurnal Ilmiah IAIN IB, "Kajian Islam
- Prasetyo, Eko.(2005). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta: Resist Book, cet. ke-3.
- Qomar, Mujamil.(2005). *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga.
- Reece, Ian and Stephen Walker.(1994). *Teaching, Training and Learning A Practical Guide*, Sunderland: Business Education Publishers Limited, Second Edition.
- Ridla, Muhammad Jawwad.(2002). *al-Fikr al-Tarbawiy al-Islamiyyu Muqaddimat fi Ushulih al-Ijtima'iyati wa al-'Aqlaniyyat*, Penj. Mahmud Arif, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy.(1979). *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Wafi', Ali Abdul Wahid.(2004). *Kejeniusan Ibnu Khaldun*, Penj. Sari Narulita, Jakarta: Nuansa Press